

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem demokrasi kontemporer, partai politik memainkan peran krusial sebagai pilar utama dalam proses rekrutmen politik. Melalui mekanisme tersebut, diharapkan partai mampu menjaring figur-figur potensial yang memiliki integritas tinggi, kompetensi yang memadai, serta komitmen untuk mengisi jabatan publik. Idealnya, proses ini dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan berdasarkan prinsip meritokrasi. Akan tetapi, realitas politik di tingkat lokal di Indonesia kerap kali menunjukkan praktik yang menyimpang dari prinsip-prinsip ideal tersebut. Di sejumlah wilayah, termasuk di Provinsi Banten, partai politik justru dimanfaatkan oleh elite tertentu sebagai instrumen untuk melanggengkan dominasi kekuasaan yang berakar pada relasi kekerabatan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi tumbuh dan bertahannya dinasti politik, yakni konsentrasi kekuasaan dalam satu keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu contoh paling menjadi perhatian dari fenomena dinasti politik di Indonesia dapat ditemukan di Provinsi Banten. Dinasti politik H. Tubagus Chasan Sohib menjadi ilustrasi yang jelas tentang bagaimana kekuasaan lokal dibangun dan dikonsolidasikan melalui hubungan kekerabatan yang kuat, dukungan sumber daya ekonomi, serta jejaring sosial dan politik yang luas. Tubagus Chasan Sohib, seorang pengusaha dan tokoh masyarakat Banten, mulai membangun pengaruh politiknya sejak awal 2000-an (Alifah Jasmine Kallista Remanu, 2025). Melalui pengaruhnya dalam organisasi masyarakat, bisnis konstruksi, dan akses terhadap partai politik besar seperti Golkar, H. Tubagus Chasan Sohib menempatkan anggota keluarganya dalam berbagai posisi strategis pemerintahan, termasuk jabatan gubernur, wali kota, bupati, dan anggota legislatif. Anak perempuannya, Ratu Atut Chosiyah, menjadi Gubernur perempuan pertama di Indonesia dan menjabat selama dua periode. Sementara itu, sejumlah kerabat

lainnya juga berhasil merebut kekuasaan di berbagai level pemerintahan di Banten (Sukri, 2020).

Keluarga H. Tubagus Chasan Sohib membentuk apa yang disebut sebagai "dinasti gurita" (octopus dynasty), yaitu bentuk kekuasaan politik yang mencengkeram berbagai sektor pemerintahan melalui banyak perpanjangan tangan dalam satu lingkaran keluarga. Struktur kekuasaan ini tidak hanya dijalankan melalui jalur politik formal seperti pemilu, namun juga melalui mekanisme informal seperti patronase sosial, relasi ekonomi, dan dominasi dalam budaya lokal. Gabungan antara modal finansial, jaringan bisnis, koneksi dengan elite partai, serta pengaruh dalam organisasi tradisional seperti kelompok jawara dan lembaga keagamaan menjadi fondasi utama yang menopang kelangsungan dinasti ini selama hampir dua dekade. Dalam kondisi ini, peran partai politik berubah secara signifikan: dari lembaga yang seharusnya selektif terhadap calon pemimpin berdasarkan kualitas, menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan dinasti yang dimotori oleh kelompok yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan (Sutisna, 2017).

Namun, dominasi dinasti ini mulai menghadapi tantangan serius sejak tahun 2013, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan sengketa Pilkada Lebak. Penetapan tersebut menjadi awal dari pelemahan kekuasaan dinasti H. Tubagus Chasan Sohib, yang kemudian disusul oleh proses hukum terhadap beberapa anggota keluarganya yang lain (Sukri, 2020). Selama periode 2013 hingga 2024, terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam konstelasi politik Banten. Hal ini ditandai oleh kekalahan sejumlah kandidat dari keluarga dinasti dalam kontestasi Pilkada, turunnya dukungan masyarakat, dan munculnya tokoh-tokoh baru yang berasal dari luar lingkaran dinasti. Pergeseran ini menunjukkan mulai terkikisnya hegemoni dinasti yang sebelumnya begitu kuat mengakar dalam politik lokal Banten.

Proses keruntuhan dinasti politik H. Tubagus Chasan Sohib dapat dianalisis dari beberapa faktor. Pertama, intervensi dari lembaga penegak hukum seperti KPK yang berhasil memotong jaringan patronase melalui penindakan kasus

korupsi. Kedua, perubahan dinamika internal partai politik yang mulai memberikan ruang bagi figur non-dinasti untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Ketiga, meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan yang dinilai sarat dengan konflik kepentingan dan praktik nepotisme. Keempat, tumbuhnya literasi politik publik serta meningkatnya peran media massa dan media sosial dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan dan dinamika politik (Wulan Roma Tua¹, 2025). Gabungan dari seluruh faktor tersebut secara kolektif mempercepat keruntuhan kekuasaan dinasti H. Tubagus Chasan Sohib, atau paling tidak mengurangi pengaruh mereka secara signifikan dalam politik lokal Banten.

Meski demikian, keruntuhan ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang berlangsung melalui berbagai tahapan. Beberapa anggota keluarga masih aktif dalam dunia politik dan menduduki jabatan publik. Oleh karena itu, kajian atas proses keruntuhan ini penting untuk memahami dinamika kekuasaan lokal di Indonesia, khususnya dalam mengungkap bagaimana relasi kekerabatan membentuk struktur kekuasaan, serta bagaimana struktur tersebut dipertahankan dan akhirnya digugat oleh kekuatan baru dalam demokrasi lokal. Penelitian ini juga penting dalam menjelaskan peran institusi-institusi demokrasi seperti partai politik, aparat hukum, media, dan masyarakat sipil dalam membongkar struktur kekuasaan lokal yang cenderung oligarkis dan eksklusif.

Sebuah oligarki politik yang memanfaatkan struktur formal partai politik dan birokrasi telah menjadi instrumen bagi keluarga Tubagus untuk mengubah kapital sosial dan ekonomi menjadi kekuatan politik. Sejak awal 2000-an, kekuatan sosial dan finansial digunakan sebagai alat utama dalam membangun jaringan politik, menggeser prinsip meritokrasi dalam rekrutmen politik. Alhasil, partai politik kehilangan peran sebagai wahana seleksi kader yang berkualitas, dan justru menjadi kendaraan pelestarian kekuasaan oligarkis. Fenomena ini mempersempit ruang kompetisi politik bagi individu di luar jaringan dinasti, yang pada akhirnya merusak kualitas demokrasi secara perlahan (Hafsari¹, 2022).

Keluarga H. Tubagus Chasan Sohib berhasil mendominasi jabatan-jabatan penting di eksekutif maupun legislatif di Banten berkat peran signifikan partai politik yang membuka jalan bagi masuknya kekuatan dinasti. Lewat dukungan partai besar seperti Golkar dan beberapa partai lainnya, anggota inti keluarga ini mulai dari anak, menantu, hingga ipar dapat menduduki berbagai jabatan publik baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Hal ini menunjukkan pragmatisme politik dalam tubuh partai yang lebih mengutamakan kandidat dengan popularitas, modal besar, atau jaringan sosial yang kuat, dibandingkan dengan rekam jejak atau kapasitas kepemimpinan (Hafsari1, 2022). Fungsi rekrutmen politik pun mengalami pergeseran dari ajang pembinaan kader berbasis kualitas menjadi sarana mempertahankan kekuasaan dinasti.

Dalam konteks ini, sosok H. Tubagus Chasan Sohib memainkan peran sentral. Sebagai patron utama, ia tidak hanya mengendalikan jaringan politik tetapi juga sektor ekonomi strategis lokal, termasuk proyek-proyek pembangunan dan hubungan dengan kalangan pengusaha. Hubungan timbal balik antara elite politik dan kalangan bisnis membentuk pola klientelisme yang saling menguntungkan, di mana dukungan dana kampanye dibalas dengan kebijakan yang pro-pengusaha, membuka jalan bagi kolusi dan nepotisme yang sistemik (Sukri, 2020).

Puncak konsolidasi kekuasaan dinasti terjadi saat Ratu Atut Chosiyah menjabat sebagai Gubernur Banten. Ia menjadi simbol utama dinasti sekaligus aktor penggerak utama dalam mempertahankan dan memperluas jaringan kekuasaan keluarganya melalui jalur formal maupun informal. Strategi dinasti ini dirancang secara sistematis, dengan penguasaan atas lembaga legislatif, birokrasi, organisasi masyarakat, dan partai politik sebagai instrumen utama. Kerabat dan loyalis ditempatkan di posisi kunci seperti bupati, walikota, hingga pimpinan DPRD, guna mengamankan anggaran, menjaga stabilitas jaringan kekuasaan, dan menjamin keberlangsungan politik dinasti di masa mendatang. Dalam hal ini, partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penyaring pemimpin yang layak, dan malah menjadi saluran formalitas untuk melegitimasi pencalonan figur-figur dari dinasti politik.

Namun, dominasi yang begitu kuat ini justru menciptakan kontradiksi dalam konteks demokrasi lokal. Di satu sisi, penguasaan kekuasaan oleh satu keluarga bisa memberikan stabilitas politik sementara. Tetapi di sisi lain, hal ini menghambat regenerasi kepemimpinan, menutup akses bagi calon-calon dari luar dinasti, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Ketika masyarakat melihat bahwa pemimpin dipilih lebih karena relasi darah daripada kompetensi, maka legitimasi terhadap demokrasi menjadi lemah. Dinasti ini pun berubah menjadi simbol dari oligarki lokal dan kegagalan institusi partai politik dalam menjalankan fungsi substantifnya.

Indikasi awal keruntuhan dinasti mulai terlihat saat dua peristiwa penting terjadi secara beruntun. Pertama, wafatnya H. Tubagus Chasan Sochib yang selama ini menjadi tokoh sentral dan poros loyalitas politik keluarga. Kedua, penetapan Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi yang mencuat pada tahun 2013. Kedua kejadian ini menjadi titik balik yang signifikan dalam melemahkan kontrol politik yang selama ini dimiliki oleh dinasti tersebut, sekaligus membuka peluang bagi aktor-aktor politik baru untuk masuk dan mulai membangun dukungan massa. Lemahnya mesin politik keluarga, mengendurnya loyalitas dari elite-elite lokal, serta pudarnya legitimasi moral di hadapan masyarakat turut mempercepat penurunan pengaruh politik dinasti ini. Puncak dari proses ini tercermin dalam hasil Pilkada Banten 2024, di mana kandidat yang berasal dari keluarga Atut mengalami kekalahan yang cukup telak (Alifah Jasmine Kallista Remanu, 2025).

Kejatuhan dinasti ini tidak semata-mata dipicu oleh faktor internal seperti hilangnya figur patron utama dan melemahnya kekuatan dari dalam keluarga, tetapi juga didorong oleh faktor eksternal yang muncul. Kemunduran kekuasaan dan kekalahan dalam Pilgub Provinsi Banten 2024 menjadi perhatian publik nasional hingga menjadi banyak perbincangan hangat dalam berbagai forum politik dimana kekuatan politik yang sudah mengakar beberapa periode itu pun bisa kalah ditingkat eksekutif Pilgub. Dominasi di DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak selalu menjadi kemenangan Pilgub. Kemunduran kekuasaan dapat dilihat dari berkurangnya secara perlahan anggota dinasti yang menduduki jabatan publik

selama beberapa tahun terakhir dari berbagai tingkat Eksekutif dan Legislatif Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Table 1.1 Dinasti Tubagus Chasan Sohib di Provinsi Banten

Penetapan Jabatan tahun 2009 - 2014			
No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Ade Rossi K.	Wakil Ketua DPRD Kota Serang	2009-2014
2	Ratu Tatu Chasanah	Wakil Bupati Serang	2010-2015
3	Airin Rachmi Diany	Wali Kota Tangerang Selatan	2011-2016
4	Heryani	Wakil Bupati Pandeglang	2011-2016
5	Tb. Haerul Jaman	Wali Kota Serang	2011-2018
6	Ratu Atut Chosiyah	Gubernur Banten (Periode II)	2012-2014
Penetapan Jabatan tahun 2014 - 2019			
No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Ade Rossi K.	Wakil Ketua DPRD Banten	2014-2019
2	Ratu Tatu Chasanah	Bupati Serang	2016-2021
3	Airin Rachmi Diany	Wali Kota Tangsel (Periode II)	2016-2021
4	Tanto Warsono Arban	Wakil Bupati Pandeglang	2016-2021
5	Andika Hazrumy	Wakil Gubernur Banten	2017-2022
Penetapan Jabatan tahun 2019 - 2024			
No.	Nama	Jabatan	Periode
1	Ratu Ria Maryana	Wakil Ketua DPRD Kota Serang	2019-2024
2	Ratu Tatu Chasanah	Bupati Serang (Periode II)	2021-2026
3	Pilar Saga Ichsan	Wakil Wali Kota Tangsel	2021-2026
4	Tanto Warsono Arban	Wakil Bupati Pandeglang (Periode II)	2021-2026

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media

Dengan memfokuskan kajian pada rentang waktu 2013 hingga 2024 penelitian ini berupaya mengamati bagaimana kekuatan dinasti politik yang dibangun oleh H. Tubagus Chasan Sohib mengalami transformasi besar baik

dalam hal kekuasaan politik, pengaruh sosial, maupun persepsi masyarakat. Studi ini menjadi relevan tidak hanya untuk memahami dinamika kekuasaan di Provinsi Banten, tetapi juga sebagai refleksi terhadap tantangan yang dihadapi demokrasi elektoral Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis data politik lokal, hasil pemilu, serta dokumentasi kasus-kasus hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memicu kemunduran dan keruntuhan dinasti politik tersebut, serta menyusun rekomendasi strategis bagi penguatan demokrasi lokal yang lebih terbuka, adil, dan berbasis meritokrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Fenomena keruntuhan dinasti politik H. Tubagus Chasan Sochib di Provinsi Banten merupakan cerminan konkret bagaimana struktur kekuasaan yang berakar pada hubungan kekerabatan dapat mengalami kemunduran secara bertahap. Selama hampir dua dekade, keluarga besar Chasan Sochib berhasil mengonsolidasikan kekuatan politiknya melalui kombinasi antara modal ekonomi, jaringan sosial yang luas, namun, sejak tahun 2013 dominasi tersebut mulai melemah akibat serangkaian dinamika politik dan hukum yang kompleks, disertai dengan perubahan orientasi politik masyarakat Banten yang semakin kritis terhadap praktik oligarki dan politik dinasti. Dalam konteks itu, terdapat sejumlah persoalan penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Pertama, bagaimana dinamika proses kemunduran dinasti politik H. Tubagus Chasan Sochib berlangsung selama periode 2013 hingga 2024. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan melemahnya figur sentral seperti Ratu Atut Chosiyah akibat kasus korupsi, tetapi juga mencakup peluruhan kekuatan patronase politik, munculnya disintegrasi di tubuh keluarga, serta menurunnya loyalitas elite-elite lokal yang sebelumnya menjadi penopang utama kekuasaan dinasti tersebut.

Faktor internal seperti hilangnya figur pemersatu dan berkurangnya soliditas antaranggota keluarga berkontribusi terhadap menurunnya stabilitas kekuasaan, sedangkan faktor eksternal seperti meningkatnya penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pergeseran orientasi partai politik

yang mulai memberi ruang bagi kandidat di luar lingkaran dinasti, serta meningkatnya pengaruh media massa dan masyarakat sipil dalam mengawal transparansi pemerintahan turut mempercepat proses pelemahan tersebut. Dalam perspektif yang lebih luas, perlu dipahami pula apakah kemunduran ini benar-benar menandai berakhirnya dominasi politik berbasis kekerabatan, atau justru menjadi bentuk transisi menuju pola oligarki baru dengan aktor-aktor yang berbeda. Pertanyaan ini menjadi relevan untuk menilai sejauh mana demokrasi lokal di Banten telah berkembang menuju sistem politik yang lebih inklusif, kompetitif, dan berbasis meritokrasi (Hafsari1, 2022).

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, teori, penelitian terdahulu yang telah diidentifikasi, maka pertanyaan dalam penelitian ini dapat dinarasikan sebagai berikut:

1. Mengapa dinasti politik H. Tubagus Chasan Sohib mulai mengalami keruntuhan pada rentang tahun 2013-2024
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam melemahkan dominasi kekuasaan dinasti tersebut?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses keruntuhan dinasti politik H. Tubagus Chasan Sohib di Provinsi Banten dalam rentang waktu 2013 hingga 2024. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi dinamika sosial, politik, dan hukum yang berkontribusi terhadap kemunduran kekuasaan dinasti tersebut. Penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi praktik politik dan praktik

non-politik yang berperan dalam menggeser pola kekuasaan berbasis kekerabatan menuju arah yang lebih demokratis.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai keruntuhan dinasti politik H. Tubagus Chasan Sohib di Provinsi Banten memberikan manfaat yang luas baik secara teoretis, praktis, maupun akademis. Dalam konteks ilmiah, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu politik, khususnya yang berkaitan dengan dinamika kekuasaan lokal, praktik oligarki, serta proses demokratisasi di tingkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi berbagai pihak terutama partai politik, lembaga penegak hukum, media, dan masyarakat sipil untuk memahami bagaimana praktik politik berbasis kekerabatan menghambat konsolidasi demokrasi.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian mengenai dinasti politik, oligarki lokal, dan dinamika kekuasaan dalam konteks demokrasi daerah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai bagaimana relasi sosial, budaya, dan ekonomi dapat membentuk serta sekaligus menggoyahkan struktur kekuasaan dinasti politik.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi partai politik, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum dalam memperkuat mekanisme demokrasi lokal yang lebih transparan dan inklusif. Penelitian ini juga diharapkan memberi wawasan bagi masyarakat sipil tentang pentingnya peran publik dalam mengawasi proses politik agar tidak kembali dikooptasi oleh kepentingan oligarkis serta menjadi dasar bagi kajian lanjutan mengenai perubahan perilaku pemilih dan reformasi politik daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara runtut agar pembahasan yang disajikan dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Setiap bab dalam penelitian ini memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga keseluruhan pembahasan membentuk alur berpikir yang logis dari awal hingga akhir. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terbagi ke dalam enam bab utama, yaitu sebagai berikut.

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian awal yang menjelaskan dasar pemikiran penulis dalam memilih topik penelitian tentang keruntuhan dinasti politik H. Tubagus Chasan Sochib di Provinsi Banten periode 2013–2024. Dalam bab ini dijelaskan berbagai aspek penting seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca mengenai konteks dan arah penelitian, serta alasan mengapa fenomena keruntuhan dinasti politik di Banten penting untuk dikaji secara ilmiah.

1.5.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi pembahasan mengenai teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan topik dinasti politik dan kekuasaan lokal. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang konsep-konsep penting seperti dinasti politik, oligarki, patronase, legitimasi, serta hegemoni politik. Semua konsep ini dikaji untuk memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menganalisis kasus Banten. Selain itu, bab ini juga menyertakan kerangka teori yang digunakan untuk membaca fenomena keruntuhan dinasti Chasan Sochib, dengan menyoroti bagaimana relasi kekuasaan, legitimasi, dan hegemoni bekerja dalam konteks politik lokal.

1.5.3 Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif- analitis, karena penelitian ini berusaha memahami secara mendalam proses dan faktor-faktor yang menyebabkan melemahnya kekuasaan dinasti politik Chasan Sohib di Banten. Bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta teknik analisis data yang digunakan penulis untuk menarik kesimpulan. Selain itu, dalam bab ini juga dijelaskan alasan pemilihan metode kualitatif serta pertimbangan etis dalam pelaksanaan penelitian.

1.5.4 Bab IV Gambaran Umum

Bab ini berfungsi untuk memberikan latar empiris bagi penelitian. Di dalamnya dijelaskan secara ringkas kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan politik Provinsi Banten yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya dinasti politik Chasan Sohib. Pembahasan juga mencakup sejarah munculnya dinasti ini, strategi mereka dalam membangun kekuasaan, serta faktor-faktor yang membuatnya bertahan cukup lama sebelum akhirnya mengalami kemunduran. Dengan memahami konteks ini, pembaca dapat melihat hubungan antara struktur sosial Banten dan pola kekuasaan keluarga politik tersebut.

1.5.5 Bab V Hasil dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian. Bagian ini memaparkan hasil temuan di lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah dibahas sebelumnya. Analisis dalam bab ini berfokus pada proses keruntuhan dinasti politik Chasan Sohib, mulai dari munculnya krisis legitimasi, melemahnya

jejaring patronase, hingga perubahan persepsi masyarakat terhadap figur dan keluarga dinasti tersebut. Di dalamnya juga dibahas bagaimana peran media, lembaga penegak hukum, dan dinamika politik nasional turut berkontribusi terhadap menurunnya dominasi politik keluarga Chasan Sohib di Banten.

1.5.6 Bab VI Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dan merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Sementara itu, bagian saran berisi rekomendasi yang bersifat praktis maupun akademis. Saran praktis diarahkan pada upaya memperkuat tata kelola demokrasi lokal agar lebih transparan dan partisipatif, sedangkan saran akademis ditujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah lebih jauh fenomena dinasti politik di daerah lain di Indonesia.

